

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Penasihat Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak)” Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penasihat Hukum melakukan tugasnya dalam rangka memberi bantuan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi beserta solusinya.

Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Lembaga Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak telah mengimplementasikan pendampingan sesuai prosedur bantuan hukum yang berlaku dengan cara menjalankan kuasa hukum, pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Fakhrudin. Dalam menjalankan peran dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak memberikan bantuan secara cuma-cuma (prodeo) kepada Fakhrudin, terdakwa kasus korupsi. Bantuan cuma-cuma itu tidak karena Fakhrudin kategori masyarakat tidak mampu tetapi karena permasalahan hukum yang dialaminya termasuk unik lebih bersifat adanya perbedaan dalam penafsiran kasus. Pihak penuntut menuduh terdakwa telah melakukan korupsi sedangkan pihak terdakwa menganggap sebagai bentuk peminjaman uang pada umumnya. Yang lebih aneh lagi adalah biaya proses peradilan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kasus yang didakwakan Fakhrudin itu lebih besar daripada jumlah uang yang didakwakan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sultan Fatah Demak dan menjelaskan tentang prosedur bantuan hukum yang dilakukannya. Selain itu peneliti memberikan penjelasan tentang peran dan fungsi penasihat hukum terhadap terdakwa yang terkena kasus pidana korupsi. Demikian juga peneliti menjelaskan bagaimana kendala dan solusi dalam proses memberikan bantuan hukum.

Hasil penelitian ini penting karena menunjukkan fakta bahwa dalam menerapkan hukum pidana korupsi masih ada penegak hukum yang hanya berpijak pada hukum positif secara tekstual. Hal yang berkaitan dengan hakikat persoalan timbulnya sebuah kasus tidak menjadi bahan pertimbangan. Persoalan hukum yang sebenarnya cukup ditangani secara non-penal, dengan melakukan penyelesaian kekeluargaan atau mediasi tidak dilakukan oleh pihak pengadilan. Hasil keputusan sidang akhirnya diputuskan bahwa Fakhrudin dinyatakan bersalah dan melanggar hukum.

Kata kunci: Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

This study is entitled "Implementation of Legal Aid by Legal Advisers in Corruption Crime Cases (Case Study at Sultan Fatah Demak Legal Aid Institute)" It aims to find out how the Legal Counsel does his duty in order to provide legal assistance in corruption cases and their solutions.

The research method uses a sociological juridical approach. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. Analysis of data in a systematic way includes data reduction, data presentation, and concluding.

Sultan Fatah Demak Legal Aid Institute has implemented assistance in accordance with applicable legal aid procedures by carrying out legal counsel, assistance, defense, and other legal actions for the legal benefit of the recipient of legal aid. In the corruption case that was charged to Fakhrudin. In carrying out its role and function, the Sultan Fatah Demak Legal Aid Institute provided free assistance (prodeo) to Fakhrudin, the defendant in a corruption case. The free assistance was not because Fahrudin was not able to afford the community category but because the legal problems he experienced were unique and were more different in case interpretation. The prosecutor accused the defendant of corruption while the defendant considered it a form of borrowing money in general. What is even stranger is that the costs of the judicial process incurred by the government for the case charged by Fakhrudin were greater than the amount of money charged with corruption. The purpose of this study is to find out how the legal aid procedures carried out by the Sultan Fatah Demak Legal Aid Institute and explain about the legal aid procedures it does. Also, the researcher explained the role and function of legal counsel for defendants exposed to corruption cases. Likewise, the researcher explains how obstacles and solutions in the process provide legal assistance. The results of this study are important because they show the fact that in applying the criminal law of corruption there are still law enforcers who only rely on textually positive laws. Matters relating to the nature of the issue of the emergence of a case are not taken into consideration. Legal issues that are handled by non-penal law, by carrying out a family settlement or mediation are not carried out by the court. The final court decision was decided that Fakhrudin was found guilty and violated the law.

Keywords: Implementation of Legal Aid in Corruption Cases